



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS KESEHATAN

Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Lamongan 62211

Telp. (0322) 321338, Fx (0322) 321338

E-mail: dinkes@lamongan.go.id, website: www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lamongan Tahun 2019 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2019, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2019 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan selama tahun 2019, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Lamongan.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran OPD dan aparatur pemerintah

Kabupaten Lamongan mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan masing-masing.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Lamongan secara lebih sinergis.

Lamongan, Januari 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN**



dr. TAUFIK HIDAYAT

Penbina Utama Muda

NIP.19630702 198903 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Data Umum Oirganisasi	9
C.1 Personil	9
C.2 Sarana dan Prasarana	10
C.3 Pembiayaan	11
D. Sistematika Penyajian LKjIP	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
A.1 Tujuan	13
A.2 Sasaran dan Indikator Kinerja	14
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
A.1 Pencapaian Kinerja	16
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	17
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra	17
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional .	17
A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan	18
A.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja	21
B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
Lampiran	
1. Matrik Rencana Stratejik (RS)	
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2019	
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
4. Lampiran Lainnya (Penghargaan, dsb.)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab teknis pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, yang dalam hal ini sudah mengalami perubahan baik pada misi, tujuan, sasaran maupun Indikator Kinerjanya. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan menjabarkan tujuan tersebut kedalam 1 (satu) sasaran, dimana untuk mewujudkan sasaran tersebut telah ditetapkan program operasional dan kegiatan pokok.

Untuk mengukur pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah ditetapkan indikator pencapaian keberhasilan sasaran sejumlah 2 (dua) indikator.

Diantara indikator yang ada pada tahun 2019 di rumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun 2 (dua) indikator kinerja utama tersebut adalah **“Angka Harapan Hidup”** dan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2019 merupakan laporan capaian kinerja (performans result) selama tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019, selama periode tahun tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan melaksanakan 5 Program ditambah Program Pelayanan Administrasi perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Dari 9 program dijabarkan dalam 131 kegiatan untuk mencapai

1 (satu) sasaran strategis dengan sejumlah indikator sasaran sebagaimana telah di sebutkan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 1. Penyediaan Jasa Perkantoran
 2. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
 3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 4. Penyediaan Tenaga Kesehatan (Dana BK)

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 1. Peningkatan Pengetahuan Petugas Asset Puskesmas
 2. Monev Sistem Informasi Kepegawaian

- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
 3. Forum OPD
 4. Penyusunan Dokumen Standart Pelayanan Minimum (SPM)
 5. Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah

- 5. Program Sumber Daya Kesehatan**
 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
 2. Peningkatan, Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
4. Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas
5. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Anak (Pengadaan Mobil Sehat)
6. Pembiayaan Perijinan, Sertifikasi Dan Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan
7. Pendidikan dan Pelatihan Formal
8. Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan
9. Pemandirian dan Pementapan Internsip
10. Binwas Mutu Tenaga Kesehatan

6. Program Kesehatan Masyarakat

1. Pengembangan Desa Siaga Aktif
2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyandu
3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kesehatan Sekolah
4. Pengembangan Media Promosi Kesehatan
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Posyandu
6. Peningkatan Kapasitas Kader Saka Bhakti Husada
7. Pengembangan Desa Ber-PHBS dan Keluarga Sehat (KS)
8. Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas
9. Pengembangan UKBM (Peningkatan Kinerja Poskestren)
10. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas untuk Remaja Pedesaan
11. Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Poskosdes
12. BOK Puskesmas
13. BOK Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
14. Jaminan Persalinan (Jampersal)
15. Pembinaan dan Pengawasan Air Bersih dan Depo Air Minum

16. Pengolahan Limbah Medis Padat
17. Fasilitasi Penyelenggaraan Open Defecation Free (ODF)
18. Pengembangan Program Kabupaten Sehat
19. Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi Calon Jamaah Haji
20. Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
21. Pemeriksaan Sampel Udara Dan Pemeriksaan Air Badan Air
22. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
23. Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan dan Minuman
24. Pembinaan Puskesmas PONED oleh Tim PONEK Kabupaten
25. Telaah Manajemen Program Kesehatan Reproduksi
26. Telaahan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
27. Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)
28. Audit Maternal Perinatal
29. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
30. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
31. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit. A dan kekurangan zat Gizi Mikro Lainnya
32. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
33. Sosialisasi, Penyuluhan dan Pembinaan Bidang Kesehatan
34. Pengembangan taman posyandu (Dana BK)
35. Pendampingan Pencegahan Stunting bagi Ibu Hamil (Dana BK)
36. Pendampingan Poskestren (Dana BK)

7. Program Pelayanan Kesehatan

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Yankes
2. Pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas

3. Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan Swasta dan Praktek Perorangan
4. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan JKN
5. Pelayanan Rawat Inap Gratis Ruang Kelas III di Puskesmas
6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan JKN di Puskesmas
7. Kunjungan Pusling di Desa Terpencil /Desa Perbatasan
8. Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
9. Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan
10. Peningkatan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana
11. Peningkatan Mutu Perizinan Sarana Kesehatan Tradisional dan Praktek Perorangan
12. Sosialisasi Peningkatan Asuhan Mandiri di Puskesmas dan Masyarakat
13. Pembinaan Hatra yang Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional
14. Penilaian Kinerja Puskesmas
15. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
16. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (DBHCHT)
17. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
18. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (Dana Pajak Rokok)
19. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lamongan
20. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Babat
21. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Brondong
22. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Paciran
23. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bluluk
24. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sukorame
25. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngimbang
26. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sambeng

27. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mantup
28. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kembangbahu
29. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sugio
30. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kedungpring
31. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dradah
32. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Modo
33. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangpilang
34. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Moropelang
35. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sukodadi
36. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumberaji
37. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pucuk
38. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tikung
39. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dermolemahbang
40. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Deket
41. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Glagah
42. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangbinangun
43. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalitengah
44. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Turi
45. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karanggeneng
46. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekaran
47. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Maduran
48. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Laren
49. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Payaman

50. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tlogosadang
51. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangembang
52. Kunjungan Konseling Kesehatan oleh Tim yang Terdiri dari Bidan dan Perawat Ponkesdes dibantu oleh Mitra dari Unsur Masyarakat/ Organisasi Masyarakat (Dana BK)

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

1. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
2. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
3. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
4. Peningkatan Cakupan Imunisasi
5. Pengadaan Sarana Penyimpan Vaksin
6. Pekan Imunisasi Nasional
7. Penanggulangan Penderita AFP, Campak, KLB dan Flu Burung
8. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
9. Pengamatan dan Pencegahan Program Imunisasi dan Penanggulangan Kasus Difteri
10. Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara
11. Peningkatan dan Pelatihan Petugas Keswa dan Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie
12. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
13. Pelayanan Kesehatan Indera
14. Pembinaan Paguyuban Tuberkulosis Paru
15. Penanggulangan Penyakit HIV / AIDS
16. Pengadaan Sarpras Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
17. Program Kesehatan Haji

9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DBHCHT)
2. Pengembangan Sarana Prasarana Puskesmas
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Secara umum kendala dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2019 adalah faktor dukungan anggaran serta tepatnya perencanaan sesuai dengan waktu dan kebutuhan untuk masing-masing program dan kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 03 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 58 tahun 2016 adalah melaksanakan kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selaras dengan sasaran Dinas Kesehatan *“Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat”* dengan indikator sasaran *“Angka Harapan Hidup & Indeks Kepuasan Masyarakat”* dimana pembangunan kesehatan harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berpedoman

pada tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal (SPM).

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2016 Pola Tata Kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Kesehatan dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Kefarmasian
 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah Tangga
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2016, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan, melaksanakan tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkup Dinas Kesehatan dan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan analisis determinan kesehatan.
 - b. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan.
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - d. Koordinasi pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset dan dokumen di UPT.
 - e. Pengelolaan administrasi keuangan.
 - f. Pengelolaan administrasi perlengkapan.
 - g. Pengelolaan asset dan barang milik Negara.
 - h. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol.
 - i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
 - j. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yutstisial*) di bidang kepegawaian.
 - k. Pelaksanaan koordinasi penyelegaraan tugas-tugas bidang dan UPT.
 - l. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
 - m. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

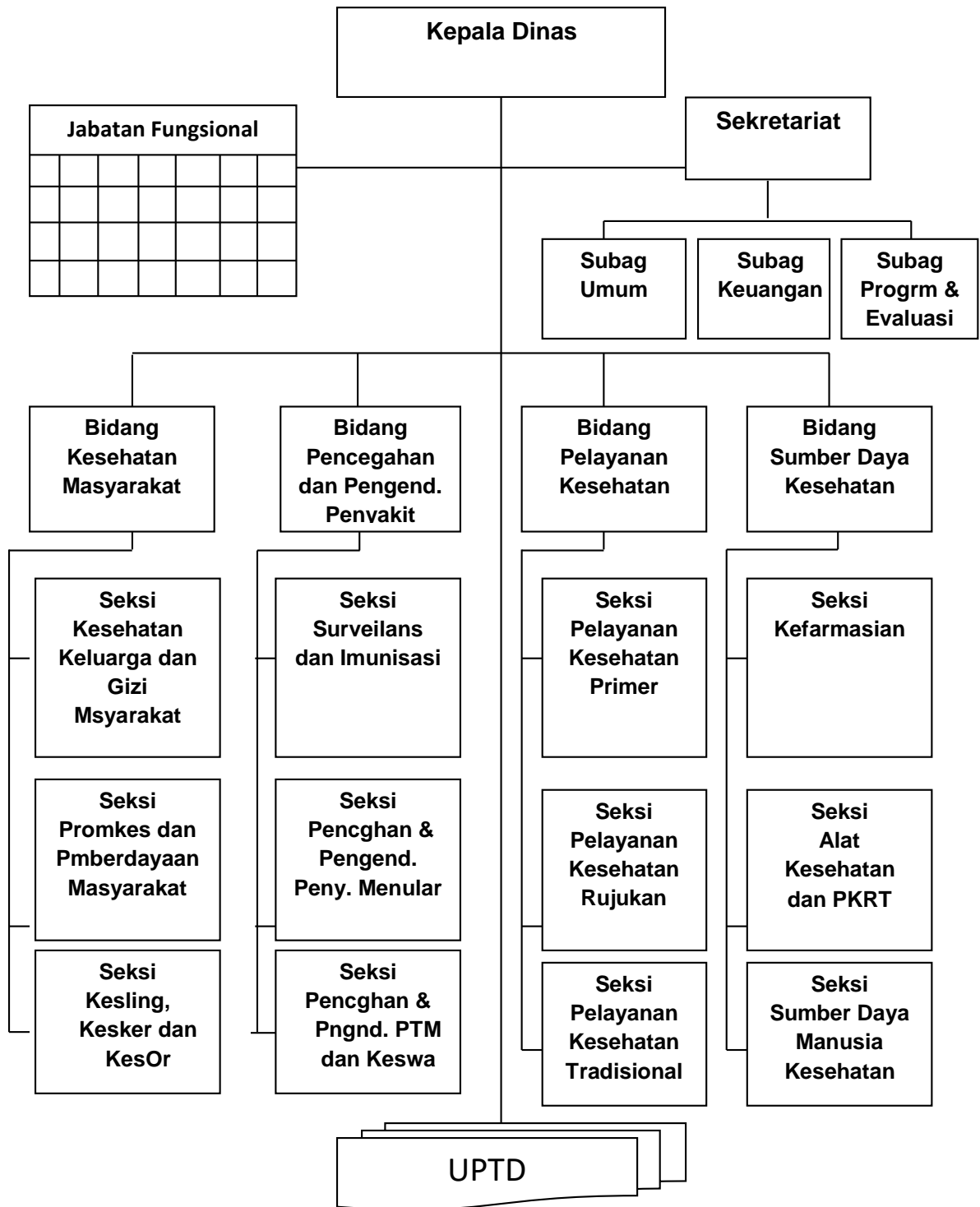
3. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan operasional di

- bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional dan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.

- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan dan mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi



C. DATA UMUM ORGANISASI

1. Personil

Untuk mendukung keberhasilan seluruh program bidang kesehatan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya kesehatan tersebut, maka di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah disediakan tenaga kesehatan yang di klasifikasikan sebagai berikut :

a. PNS

1	Dokter Umum sebanyak	:	69	orang
2	Dokter Gigi sebanyak	:	32	orang
3	Kebidanan sebanyak	:	533	orang
4	Keperawatan sebanyak	:	277	orang
5	Kesehatan Masyarakat sebanyak	:	-	orang
6	Sanitasi sebanyak	:	9	orang
7	Apoteker sebanyak	:	7	orang
8	Asisten Apoteker sebanyak	:	7	orang
9	Laborat sebanyak	:	25	orang
10	Gizi sebanyak	:	26	orang
11	Administrasi sebanyak	:	222	orang
12	Perawat Gigi sebanyak	:	18	orang
13	Rekam Medik sebanyak	:	6	orang
14	Pejabat Struktural sebanyak	:	23	orang

b. Kontrak dan Sukwan

1	Dokter umum sebanyak	:	14	orang
2	Dokter gigi sebanyak	:	-	orang
3	Kebidanan sebanyak	:	234	orang
4	Keperawatan sebanyak	:	358	orang
5	Administrasi sebanyak	:	262	orang
6	Gizi sebanyak	:	7	orang
7	Lain-lain sebanyak	:	75	orang

Bila tenaga tersebut klasifikasi berdasar pada kepangkatan sebagai berikut :

1	Pembina Utama sebanyak	:	-	orang
2	Pembina Utama Madya sebanyak	:	-	orang
3	Pembina Utama Muda sebanyak	:	9	orang
4	Pembina Tk. I	:	29	orang
5	Pembina sebanyak	:	54	orang
6	Penata Tk. I sebanyak	:	285	orang
7	Penata sebanyak	:	107	orang
8	Penata Muda Tk. I sebanyak	:	184	orang
9	Penata Muda sebanyak	:	207	orang
10	Pengatur Tk. I sebanyak	:	192	orang
11	Pengatur sebanyak	:	171	orang
12	Pengatur Muda Tk. I sebanyak	:	13	orang
13	Pengatur Muda	:	2	orang
14	Juru Tk. I	:	1	orang
15	Juru	:	-	orang
16	Juru Muda Tk. I	:	-	orang
17	Juru Muda	:	-	orang

2. Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas dan jaringannya pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya Dinas Kesehatan selalu berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung program-program yang telah direncanakan. Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada sebagai berikut :

- a. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah :
 1. Puskesmas : 33 buah
 2. Poskesdes : 474 buah
 3. Pustu : 109 buah
 4. Polindes : 217 buah
 5. Ponkesdes : 161 buah
 6. Rumah Sakit daerah : 2 buah
 7. Gudang Farmasi Kesehatan : 1 buah
 8. Laboratorium Kesehatan : 1 buah
- b. Sarana pelayanan kesehatan swasta :
 1. Klinik : 67 buah
 2. Apotek sebanyak : 108 buah
 3. Rumah Sakit Swasta sebanyak : 7 buah
 4. Rumah Sakit Ibu dan Anak : 1 buah
 5. Rumah Sakit Bedah : 1 buah

3. Pembiayaan

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2019 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp. 234.185.478.374,-. Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 9 (sembilan) program dengan 131 (seratus tiga puluh satu) kegiatan yang secara rinci akan disampaikan pada Bab. III.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Bab I - Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas, profil Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP tahun 2019.
- Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan muatan, Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dan Penetapan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Lamongan tahun 2019.
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggung jawaban kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019.
- Bab IV - Penutup**, menjelaskan kesimpulan secara tertulis dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016, yaitu: **“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”**. Dan Dinas Kesehatan Masuk pada Misi ke-1 yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan”**. serta untuk mempersiapkan keberhasilan program dan kegiatan di tahun mendatang, maka Dinas Kesehatan Kabupaten yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai institusi yang mempunyai fungsi pelayanan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-1 maka ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan adalah **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** dengan indikator tujuan **“Indeks Kesehatan”**.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2016	TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	$((e_0 - 25)/(85 - 25)) \times 100$ <p>Dimana : e₀ ; Angka Harapan Hidup; 25 Angka Min. Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka Max. Harapan Hidup (UNDP)</p>	0.796	0.801 - 0.804

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan adalah *“Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat”* dengan indikator sasaran *“Angka Harapan Hidup & Indeks Kepuasan Masyarakat”*.

SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2016	TARGET TAHUNAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan Lama Hidup: Rata-rata Penduduk dengan Asumsi tidak ada Perubahan pola mortalitas menurut Umur	71.77	71.79	71.83	71.86	71.90	71.94
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Nilai Rata-Rata IKM Tertimbang x Nilai Dasar Pengkonversian	-	-	80.25	80.75	81.26	81.76

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan/pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Sumber Daya Kesehatan
6. Program Kesehatan Masyarakat
7. Program Pelayanan Kesehatan
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjajian pelaksanaan kegiatan antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan Bupati selaku atasan langsung sebagai upaya optimalisasi pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja:
 - Angka Harapan Hidup dengan target 71.86
 - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 80.75

Penetapan kinerja Tahun 2019 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bupati Lamongan selaku atasan langsung selengkapnya sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Pencapaian Kinerja

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Hasil dari kinerja program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun anggaran 2019 dijelaskan berdasarkan pencapaian dalam pengukuran kinerja, dimana hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan berdasarkan skala sebagai berikut:

90 – 100 : Sangat Berhasil

70 – 90 : Berhasil

55 – 70 : Kurang Berhasil

< 55 : Belum Berhasil

Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	% TAHUN 2019	KET.
1	Angka Harapan Hidup	71.86	72.04	100.25%	Sangat Berhasil
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.75	80.85	100.12%	Sangat Berhasil

catatan: capaian AHH mengacu hasil tahun 2018 dikarenakan tahun 2019 belum keluar dari BPS

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja saat ini, dibutuhkan satu perbandingan dengan target maupun capaian di tahun sebelumnya. Adapun target maupun capaian tahun sebelumnya dengan tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka Harapan Hidup	71.83	72.04	71.86	72.04
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.25	80.31	80.75	80.85

catatan: capaian AHH mengacu hasil tahun 2018 dikarenakan tahun 2019 belum keluar dari BPS

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra

Keberhasilan kinerja dari tahun 2016 - 2021 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Tahun Dasar 2016	Realisasi s/d Akhir Periode Renstra				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Hidup	71.77	71.87	72.04	72.04	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	80.31	80.85	-	-

catatan: capaian AHH mengacu hasil tahun 2018 dikarenakan tahun 2019 belum keluar dari BPS

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja daerah, dibutuhkan satu perbandingan antara realisasi kinerja daerah dengan realisasi nasional. Adapun realisasi daerah dengan realisasi nasional tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Realisasi Daerah Tahun 2019	Realisasi Nasional Tahun 2019
1	Angka Harapan Hidup	72.04	71.39
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.85	-

catatan: capaian AHH mengacu hasil tahun 2018 dikarenakan tahun 2019 belum keluar dari BPS

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Data dari Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2019 di Kabupaten Lamongan mengacu hasil Tahun 2018 yaitu 72.04, hal ini dikarenakan data Tahun 2019 belum keluar dari BPS. Berdasarkan acuan tersebut maka capaian 72.04 lebih dari target yang ditentukan 71.86, atau 100.25%. Angka Harapan Hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase puskesmas terakreditasi.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah 80.85, hasil ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 80.75, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100.12% atau dapat dikatakan sangat berhasil karena melebihi batas rentang 90 – 100%.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dinas kesehatan yang tertuang dalam RENSTRA yaitu Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat ada 2 (dua) komponen tolok ukur yaitu mengenai **Aksesibilitas** dan **Kualitas** Pelayanan Kesehatan dengan 2 indikator sasaran yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dengan tolok ukur Meningkatnya **Aksesibilitas** Pelayanan Kesehatan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal ini dilaksanakan dengan program maupun kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dengan kegiatan:

- Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sedang/
Berat Puskesmas
 - Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sedang/
Berat Puskesmas Pembantu
 - Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sedang/
Berat Polindes/Ponkesdes
- b. Program Sumber Daya Kesehatan, dengan kegiatan:
- Pengadaan Prasarana Puskesmas (Ambulance, Pusling, Mobil Sehat, Alkes, Obat dan Prasarana lainnya)
 - Pendidikan Pelatihan Tenaga Kesehatan
- c. Program Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan:
- Kegiatan Program Rujuk Balik (PRB)
- d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular & Tidak Menular, dengan kegiatan:
- Pelayanan Posyandu dan Dasbindu

Dengan adanya perbaikan sarana prasarana dan peningkatan SDM diharapkan dapat mempermudah dan keterjangkauan Akses pelayanan kesehatan pada masyarakat sehingga ada rasa kepuasan masyarakat dalam melakukan kunjungan di puskesmas dan sarkes lainnya, dan seiring itu **Indeks Kesehatan** juga akan meningkat, dengan demikian derajat kesehatan dapat tercapai.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dengan tolok ukur Meningkatnya **Kualitas** Pelayanan Kesehatan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Hal ini dilaksanakan dengan program maupun kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan:
- Akreditasi Puskesmas
 - Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)

- b. Program Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - Pembinaan Puskesmas PONEK oleh Tim PONEK Kabupaten
 - Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
 - Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)
- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular & Tidak Menular, dengan kegiatan:
 - Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
 - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Peningkatan dan Pelatihan Petugas Keswa dan Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie

Dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan sesuai standart diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkat sehingga masyarakat bisa hidup sehat dan tidak mudah sakit, maka Angka Harapan Hidup meningkat, dan seiring dengan itu **Indeks Kesehatan** juga akan meningkat, dengan demikian derajat kesehatan dapat tercapai.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya aparatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan hingga saat ini berjumlah 2.204 orang. Masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga umum untuk lebih dapat mengoptimalkan kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-OPD maupun Standart Pelayanan Minimal sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2016.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang

ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 311.650.248.374,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 253.413.634.729,09 atau 81,31%, sisa dana sebesar Rp. 58.236.613.644,91 atau 18,69 % yang merupakan SILPA di Kas Daerah.

A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan masyarakat/ stake holders.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2019 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dimana pada tahun 2019 anggaran belanja yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebesar **Rp. 311.650.248.374,00** yang terdiri atas :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Belanja Tidak Langsung	77.464.770.000,00	76.960.198.864,00	99,35%
1.	Belanja Pegawai	77.464.770.000,00	76.960.198.864,00	99,35%

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Belanja Langsung	234.185.478.374,00	203.946.102.849,09	87,09%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.976.932.000,00	5.501.768.782,00	92,05%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	295.000.000	286.203.312,00	97,02%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	353.000.000,00	338.566.870,00	95,91%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	585.000.000,00	576.515.000,00	98,55%
5.	Program Sumber Daya Kesehatan	31.850.328.081,00	30.505.497.990,00	95,78%
6.	Program Kesehatan Masyarakat	35.362.709.000,00	34.512.494.672,00	97,60%
7.	Program Pelayanan Kesehatan	134.476.264.293,00	109.292.553.785,76	81,27%
8.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.525.500.000,00	2.444.711.480,00	96,80%
9.	Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas pembantu dan jaringannya	22.760.745.000,00	20.487.790.957,00	90,01%
	TOTAL BELANJA	311.650.248.374,00	280.906.301.713,09	90,14%

Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun 2019 dengan alokasi dana sebesar Rp.234.185.478.374,00 dengan realisasi sebesar Rp.203.946.102.849,09 Atau dalam prosentase sebesar 87,09%. Adapun penjelasan tentang penggunaan anggaran masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Sumber Daya Kesehatan
 - a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.4.276.452.000,- digunakan untuk belanja bahan obat-obatan, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.4.254.690.784,- atau 99.49%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.
 - b. Peningkatan, Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,- digunakan untuk belanja honor panitia pelaksana kegiatan, makanan dan minuman rapat kegiatan serta perjalanan dinas dalam daerah untuk pendistribusian obat dan perbekes ke puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.24.174.600,- atau 96.70%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan honor koordinator 2 bulan yang diperuntukan Sekretaris Dinas Kesehatan tidak bisa diberikan karena jabatan tersebut masih belum terisi.
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,- digunakan untuk honor panitia pelaksana kegiatan, makanan dan minuman rapat kegiatan serta perjalanan dinas dalam daerah untuk pmonitoring dan evaluasi pengelolaan obat dan perbekes di Puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.25.000.000,- atau 100%.
 - d. Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.9.780.626.081,- digunakan untuk belanja pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan

- sebesar Rp.8.505.817.256,- atau 86.97%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.
- e. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Anak (peng. Mobil Sehat), dengan alokasi dana sebesar Rp.17.284.000.000,- digunakan untuk belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bantu kerja, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.17.237540.000,- atau 99.73%.
 - f. Pembiayaan Perijinan, Sertifikasi dan Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 247.750.000,- digunakan untuk belanja sertifikasi kalibrasi alat kesehatan, belanja service peralatan dan perlengkapan puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.247.375.350,- atau 99.85%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.
 - g. Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan alokasi dana sebesar Rp.111.500.000,- digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, makan dan minum rapat, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.110.900.000,- atau 99.46%.
 - h. Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan, dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,- digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, makan dan minum rapat, belanja pakaian dinas dan atributnya, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.40.000.000,- atau 100%.
 - i. Pemandirian dan Pemantapan Internsip, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, makan dan minum rapat, perjalanan dinas

dalam daerah, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.30.000.000,- atau 100%.

- j. Binwas Mutu Tenaga Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, makan dan minum rapat, perjalanan dinas dalam daerah, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.30.000.000,- atau 100%.

2. Program Kesehatan Masyarakat

- a. Pengembangan Desa Siaga Aktif, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk pengembangan dan pembinaan desa siaga aktif serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.50.000.000,- atau 100%.
- b. Pemberdayaan Masyarakat melalui Posyandu, dengan alokasi dana sebesar Rp.150.000.000,- dipergunakan untuk pembinaan kader posyandu serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.148.700.000,- atau 99.13%.
- c. Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kesehatan Sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- dipergunakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Jasa Narasumber/tenagaahli/Instruktur, Belanja Cetak Buku Raport Kesehatanku, Belanja penggandaan, Belanja makan dan minuman rapat serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.175.000,- atau 97.25%.
- d. Pengembangan Media Promosi Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.123.500.000,- dipergunakan untuk media promosi kesehatan serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.123.497.000,- atau 99,99%.

- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu, dengan alokasi dana sebesar Rp.2.178.750.000,- dipergunakan untuk insentif kader posyandu serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.178.750.000,- atau 100%.
- f. Peningkatan Kapasitas Kader Saka Bakti Husada, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk peningkatan kapasitas kader SBH serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.49.450.000,- atau 98.9%.
- g. Pengembangan Desa ber PHBS dan Keluarga Sehat (KS), dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,- dipergunakan untuk pengembangan desa PHBS dan Keluarga Sehat, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.24.725.000,- atau 98.9%.
- h. Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.255.000.000,- dipergunakan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas petugas puskesmas, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.253.500.000,- atau 99.41%.
- i. Pengembangan UKBM (Peningkatan Kinerja Poskestren), dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- dipergunakan untuk peningkatan kinerja poskestren, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%.
- j. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas untuk Remaja Pedesaan, dengan alokasi dana sebesar Rp.45.000.000,- dipergunakan antara lain untuk Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Publikasi Dokumentasi dan dekorasi, Belanja Jasa Narasumber /tenaga ahli /Instruktur, Belanja penggandaan,

Belanja makan dan minuman rapat, Belanja Transport dan Akomodasi serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.44.999.900,- atau 99.99%.

- k. Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Poskesdes, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan optimalisasi kinerja poskesdes, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.50.000.000,- atau 100%.
- l. BOK Puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp.23.299.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan-bahan logistik, belanja makanan dan minuman rapat, belanja bahan pakai habis laboratorium, serta untuk kegiatan penunjang lainnya serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.23.213.768.100,- atau 99,63%.
- m. BOK Dinas Kesehatan Kab. Lamongan dengan alokasi dana sebesar Rp.3.656.170.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis seminar kit, belanja makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja transportasi dan akomodasi, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.211.312.100,- atau 87.83%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kegiatan.
- n. Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan alokasi dana sebesar Rp.1.764.000.000,- dipergunakan untuk biaya pertolongan persalinan dari rumah ke fasyankes dasar (Puskesmas), uang harian petugas rujukan pasien dari fasyankes dasar (Puskesmas) ke RS serta transport dan akomodasi dari rumah ke fasilitas fanyankes dasar (Puskesmas). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.571.939.297,- atau 89.11%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan penyerapan berdasarkan

klaim dari Puskesmas dan Rumah sakit serta sebagian besar persalinan sudah menggunakan dana JKN.

- o. Pembinaan dan pengawasan air bersih dan depo air minum, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- dipergunakan antara lain untuk pertemuan rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.30.000.000,- atau 100%.
- p. Pengolahan Limbah Medis Padat, dengan alokasi dana sebesar Rp.200.000.000,- dipergunakan untuk biaya pengambilan dan pemusnahan limbah B3. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.200.000.000,- atau 100%.
- q. Fasilitasi Penyelenggaraan Open Defecation Free (ODF), dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000,- dipergunakan untuk kegiatan pemecuan, monitoring dan verifikasi paska ODF serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.75.000.000,- atau 100%.
- r. Pengembangan Program Kabupaten Sehat, dengan alokasi dana sebesar Rp.225.000.000,- dipergunakan untuk kegiatan kabupaten kota sehat (KKS). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 225.000.000,- atau 100%.
- s. Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi calon Jamaah Haji, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- dipergunakan antara lain untuk pertemuan pemeriksaan haji di Puskesmas, pertemuan petugas Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.25.275.000,- atau 84.25%. realisasi tidak terserap 100% dikarenakan pemeriksaan kebugaran jamaah haji tidak semua menggunakan anggaran dana dari dinas kesehatan.
- t. Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- dipergunakan untuk belanja pembinaan dan pembentukan Pos UKK serta untuk

- kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.800.000,- atau 99.33%.
- u. Pemeriksaan Sampel Udara dan Pemeriksaan Sampel Air Badan Air, dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja bahan pakai habis alat kesehatan, kedokteran dari laboratorium, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.74.858.000,- atau 99.81%.
 - v. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan pengelola industri rumah tangga pangan, perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan), serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.30.000.000,- atau 100%.
 - w. Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis laboratorium serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.74.629.800,- atau 99.51%.
 - x. Pembinaan Puskesmas PONEK oleh Tim PONEK Kabupaten, dengan alokasi dana sebesar Rp.60.000.000,- dipergunakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Jasa Narasumber/tenaga ahli/Instruktur, Belanja penggandaan, Belanja makan dan minuman rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.59.175.000,- atau 98.63%.
 - y. Telaahan Manajemen Program Kesehatan Reproduksi, dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,- dipergunakan Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan, Honorarium Tim

Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Jasa Narasumber/tenaga ahli/Instruktur, Belanja Cetak, Belanja penggandaan, Belanja makan dan minuman rapat, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.98.624.800,- atau 98.62%.

- z. Telaahan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dengan alokasi dana sebesar Rp.110.000.000,- dipergunakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Jasa Narasumber/tenaga ahli/Instruktur, Belanja Cetak, Belanja penggandaan, Belanja makan dan minuman rapat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.109.350.000,- atau 99.41%.
- aa. Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila) dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,- dipergunakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Jasa Narasumber / tenagaahli / Instruktur, Belanja Cetak Buku Kesehatan Lansia dan Kohort Usila, Belanja penggandaan, Belanja makan dan minuman rapat, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.98.699.900,- atau 98.69%.
- ab. Audit Maternal Perinatal (AMP) dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk pengkajian dan pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi (AMP), belanja perjalanan dinas dalam daerah serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.49.175.000,- atau 98.35%.

- ac. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Jasa Narasumber/tenaga ahli/Instruktur, Belanja Cetak Paket Modul Pelatihan, Belanja penggandaan, Belanja makan dan minuman rapat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.49.725.000,- atau 99.45%.
- ad. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.500.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja bahan makanan untuk balita, bumil, serta makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi buruk dan ibu hamil KEK. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.409.573.875,- atau 93.97%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan koordinator honorarium panitia pelaksana kegiatan tidak ada pejabat.
- ae. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan kekurangan zat Gizi Mikro Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.335.260.000,- dipergunakan untuk belanja sosialisasi kegiatan anemia gizi besi, GAKY, KVA, Penanggulangan KEP, Zat gizi mikro, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.333.060.000,- atau 99.34%.
- af. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi, dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,- dipergunakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja bahan pakai Pakai habis alat kesehatan, kedokteran dan laboaratorium, Belanja Jasa Narasumber/tenaga

ahli/Instruktur, Belanja penggandaan, Belanja Makan dan minuman rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.19.430.000,- atau 77.72%. Realisasi tidak terserap sebesar Rp 5.570.000,- atau 22,28% dikarenakan untuk Belanja bahan pakai Pakai habis alat kesehatan, kedokteran dan laboaratorium Barang yang di beli di bawah jumlah yang di anggarkan karena stok nasional kosong.

- ag. Sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan bidang kesehatan/kelas gizi, dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000,- dipergunakan antara lain untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Jasa Narasumber/tenagaahli/Instruktur, Belanja penggandaan, Belanja Makan dan minuman rapat, Belanja Transportasi dan akomodasi dan Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.74.724.000,- atau 99.63%.
- ah. Pengembangan Taman Posyandu (Dana BK) dengan alokasi dana sebesar Rp.125.000.000,- dipergunakan untuk pengembangan dan pendampingan taman posyandu serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.124.675.000,- atau 99.74%.
- ai. Pendampingan Pencegahan Stunting Bagi Ibu Hamil (Dana BK) dengan alokasi dana sebesar Rp.245.000.000,- dipergunakan untuk pendampingan pencegahan stunting bagi ibu hamil KEK atau anemi serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.243.848.000,- atau 99.53%.

aj. Pendampingan Poskestren (Dana BK) dengan alokasi dana sebesar Rp.121.029.000,- dipergunakan untuk pendampingan poskestren serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.108.054.000,- atau 89.28%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada kesalahan administrasi (penyerapan honorarium koordinator 3 bulan tidak ada pejabat dan transportasi akomodasi kurang).

3. Program Pelayanan Kesehatan

- a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.90.000.000,- dipergunakan untuk Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Transportasi dan Akomodasi serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.89.035.400,- atau 98.93%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan jabatan koordinator kosong selama bulan April sampai dengan Juni dan untuk fotocopy hanya sesuai kebutuhan.
- b. Pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.800.000.000,- dipergunakan untuk Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli, Belanja Jasa pelayanan Kesehatan 33 Puskesmas, Belanja penggandaan dan Belanja Makan Minum Rapat. Adapun Realisasi sebesar Rp.798.875.000,- atau 99.86%.
- c. Peningkatan Mutu Perijinan Sarkes Swasta dan Praktek Perorangan, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli, Belanja Penggandaan, Belanja

Makanan dan minuman rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Transportasi dan Akomodasi. Adapun Realisasi sebesar Rp.49.175.000,- atau 98.35%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan jabatan koordinator kosong selama bulan April sampai dengan Juni.

- d. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (JKN) dengan alokasi dana sebesar Rp.89.753.313.279,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa operasional Jaminan Kesehatan Nasional dengan volume kegiatan 1 paket serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.72.935.852.697,76 atau 81.26%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada regulasi dari BPJS untuk 33 Puskesmas yaitu KBKP (Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan FKTP) yang membuat pendapatan kapitasi Puskesmas banyak mengalami penurunan.
- e. Pelayanan Rawat Inap Gratis Kelas III di Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.2.500.000.000,- dipergunakan untuk Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Bahan Pakai Habis Kedokteran 32 PKM, Belanja Bahan Obat-obatan 32 PKM, Belanja Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli, Belanja Jasa Kesehatan 32 Puskesmas, Belanja penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Makan Minum Harian Pasien 32 PKM dan Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah. Adapun Realisasi sebesar Rp.2.163.975.000,- atau 86.56% Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sistem pembayaran biaya klaim rawat inap menyesuaikan jumlah pasien yang di rawat di Puskesmas.
- f. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan JKN Di Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.55.000.000,- dipergunakan untuk Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK,

Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah. Adapun realisasi sebesar Rp.55.000.000,- atau 100%.

- g. Kunjungan Puskesmas Keliling Di Desa Terpencil atau Desa Perbatasan, dengan alokasi dana sebesar Rp.150.000.000,- dipergunakan untuk Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Belanja ATK, Belanja Bahan Obat-obatan, Belanja Bahan Logistik, Belanja Jasa Nara Sumber/Instruktur/Tenaga Ahli, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan minuman rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Adapun Realisasi sebesar Rp.148.870.075,- atau 99.24%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan jabatan koordinator kosong selama bulan April sampai dengan juni dan untuk obat menyesuaikan harga obat di E katalog.
- h. Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dengan alokasi dana sebesar Rp.200.000.000,- dipergunakan untuk belanja tropi, belanja publikasi, dokumentasi dan dekorasi, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor dengan volume kegiatan 1 kegiatan serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.200.000.000,- atau 100%.
- i. Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Transportasi dan Akomodasi. Adapun Realisasi sebesar Rp 48.975.000,- atau 97,95%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan jabatan koordinator kosong selama bulan April sampai dengan Juni dan

- pada perjalanan dinas Kabid Yankes berhalangan untuk hadir 1 kali.
- j. Peningkatan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000,- dipergunakan untuk Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Transportasi dan Akomodasi. Adapun Realisasi sebesar Rp.74.450.000,- atau 99.27%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan jabatan koordinator kosong selama bulan April sampai dengan Juni.
 - k. Peningkatan Mutu Perizinan Sarana Kesehatan Tradisional dan Praktek Perorangan. dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Transportasi dan Akomodasi. Adapun Realisasi sebesar Rp.48.900.000,- atau 97.80%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan jabatan koordinator kosong selama bulan April sampai dengan Juli.
 - l. Sosialisasi Peningkatan Asuhan Mandiri di Puskesmas dan Masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,- dipergunakan untuk Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Transportasi dan Akomodasi. Adapun Realisasi sebesar Rp.98.900.000,- atau 98,90%, Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan jabatan koordinator kosong selama bulan April sampai dengan Juli.
 - m. Pembinaan Hatra yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, dengan alokasi dana sebesar

- Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Transportasi dan Akomodasi. Adapun Realisasi sebesar Rp.48.900.000,- atau 97,8%, Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan jabatan koordinator kosong selama bulan April sampai dengan Juli.
- n. Penilaian Kinerja Puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- dipergunakan untuk belanja honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat. Adapun realisasi sebesar Rp.29.175.000,- atau 97.25%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan jabatan koordinator kosong selama bulan April sampai dengan juni.
- o. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.164.170.000,- dipergunakan untuk Belanja ATK, Belanja Publikasi Dokumentasi dan Dekorasi, Belanja Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli, Belanja penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat dan Belanja Transportasi dan Akomodasi. Adapun Realisasi sebesar Rp.1.099.952.924,- atau 94.48% Realisasi tidak terserap 100% merupakan sisa dari transport dan Akomodasi Surveyor karena dalam DPA Penginapan Surveyor dianggarkan 4 hari sesuai surat tugas namun tidak semua Surveyor menginap 4 Hari sebagian hanya menginap 3 hari selain itu biaya perjalanan dianggarkan mdenggunakan pesawat semua namun sebagian surveyor memakai kereta api dan yang dari jawa timur memakai mobil pribadi.
- p. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (DBHCHT), dengan alokasi dana sebesar Rp.2.000.000.000,- dipergunakan untuk Belanja Honorarium

Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Adapun realisasi sebesar Rp.701.727.695,- atau 35.09%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada pengembalian uang dana pajak rokok sebesar Rp.6.681.934.751,- untuk membayar tagihan bulan November dan Desember.

- q. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp.7.380.800.000,- dipergunakan untuk belanja belanja jasa pelayanan kantor (tenaga administrasi 659 orang), serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.7.148.800.000,- atau 96.86%.
- r. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (Dana Pajak Rokok), dengan alokasi dana sebesar Rp.18.294.471.000,- dipergunakan untuk Belanja premi asuransi kesehatan. Adapun realisasi sebesar Rp.15.725.864.000,- atau 85,96%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan dikarenakan ada pengembalian uang dana pajak rokok sebesar Rp.6.681.934.751,- untuk membayar tagihan bulan November dan Desember.
- s. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lamongan dengan alokasi dana sebesar Rp.733.392.845,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.545.176.080,- atau 74.34%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- t. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Babat dengan alokasi dana sebesar Rp.402.942.900,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar

- Rp.338.189.833,- atau 83.93%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- u. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Brondong dengan alokasi dana sebesar Rp.390.384.900,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.309.226.007,- atau 79.21%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
 - v. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Paciran dengan alokasi dana sebesar Rp.567.434.220,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.389.282.435,- atau 68.60%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
 - w. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bluluk dengan alokasi dana sebesar Rp.225.814.515,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.126.690.402,- atau 56.10%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
 - x. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sukorame dengan alokasi dana sebesar Rp.219.548.000,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.132.034.943,- atau 60.14%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
 - y. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngimbang dengan alokasi dana sebesar Rp.425.746.800,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan

- sebesar Rp.294.302.778,- atau 69.13%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- z. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sambeng dengan alokasi dana sebesar Rp.268.411.000,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.120.891.600,- atau 45.04%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
 - aa. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mantup dengan alokasi dana sebesar Rp.548.522.261,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.505.674.082,- atau 92.19%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
 - ab. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kembangbahu dengan alokasi dana sebesar Rp.368.948.114,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.162.667.387,- atau 44.09%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
 - ac. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sugio dengan alokasi dana sebesar Rp.313.860.900,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.216.46.087,- atau 68.97%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
 - ad. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kedungpring dengan alokasi dana sebesar Rp.346.064.400,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta

untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.266.745.153,- atau 77.08%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

- ae. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dradah dengan alokasi dana sebesar Rp.229.555.500,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.191.492.500,- atau 83.42%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- af. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Modo dengan alokasi dana sebesar Rp.159.176.300,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.74.976.560,- atau 47.10%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- ag. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangpilang dengan alokasi dana sebesar Rp.177.851.400,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.81.139.067,- atau 45.62%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- ah. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Moropelang dengan alokasi dana sebesar Rp.313.370.300,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.193.593.285,- atau 61.78%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

- ai. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sukodadi dengan alokasi dana sebesar Rp.281.476.300,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.130.431.653,- atau 46.34%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- aj. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumberaji dengan alokasi dana sebesar Rp.318.287.700,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.113.319.808,- atau 35.60%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- ak. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pucuk dengan alokasi dana sebesar Rp.234.631.100,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.151.899.010,- atau 64.74%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- al. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tikung dengan alokasi dana sebesar Rp.270.665.100,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.172.978.994,- atau 63.91%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- am. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dermolemahbang dengan alokasi dana sebesar Rp.225.528.550,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.170.046.227,- atau 74.40%.

Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

- an. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Deket dengan alokasi dana sebesar Rp.241.468.000,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.173.095.750,- atau 71.68%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- ao. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Glagah dengan alokasi dana sebesar Rp.248.838.500,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.145.189.909,- atau 58.35%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- ap. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangbinangun dengan alokasi dana sebesar Rp.335.680.100,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.131.275.605,- atau 39.11%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- aq. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalitengah dengan alokasi dana sebesar Rp.335.802.550,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.222.438.046,- atau 66.24%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- ar. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Turi dengan alokasi dana sebesar Rp.305.017.800,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan

- penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.147.549.207,- atau 48.37%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- as. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karanggeneng dengan alokasi dana sebesar Rp.510.873.150,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.361.984.995,- atau 70.86%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
 - at. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekaran dengan alokasi dana sebesar Rp.294.769.209,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.212.986.514,- atau 72.26%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
 - au. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Maduran dengan alokasi dana sebesar Rp.324.373.900,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.161.211.562,- atau 49.70%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
 - av. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Laren dengan alokasi dana sebesar Rp.263.261.900,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.170.899.865,- atau 64.92%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
 - aw. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Payaman dengan alokasi dana sebesar Rp.219.789.700,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan

penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.73.046.704,- atau 33.23%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

- ax. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tlogosadang dengan alokasi dana sebesar Rp.252.862.500,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.154.389.000,- atau 61.06%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- ay. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangsembang dengan alokasi dana sebesar Rp.198.939.600,- dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.57.131.546,- atau 28.72%. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- az. Kunjungan Konseling Kesehatan oleh Tim yang terdiri dari Bidan dan Perawat Ponkesdes dibantu oleh mitra dari unsur masyarakat atau ormas (Dana BK), dengan alokasi dana sebesar Rp.1.130.220.000,- dipergunakan untuk Belanja Transportasi dan Akomodasi. Adapun realisasi sebesar Rp.1.127.708.400,- atau 99.78%. Tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

- a. Penyemprotan Fogging/Sarang Nyamuk, dengan alokasi dana sebesar Rp.660.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis alat kesehatan/kedokteran (Melathion), pengadaan bahan pembunuh jentik nyamuk DBD, belanja bahan

- pencampur (solar, pertalite) serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.643.613.600,- atau 97.52%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan selisih harga riil pengadaan dengan harga di DPA.
- b. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- dipergunakan untuk sosialisasi persiapan dan evaluasi pelaksanaan ORI, perjalanan dinas petugas Kabupaten ke Puskesmas dalam rangka monitoring pelaksanaan ORI, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%.
 - c. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,- dipergunakan untuk belanja jasa narasumber review program diare, hepatitis, ISPA, kusta, malaria, TB, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.99.488.300,- atau 99.49%.
 - d. Peningkatan Cakupan Imunisasi, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas pengambilan vaksin petugas Kabupaten ke Provinsi, bimbingan teknis di puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.100.000,- atau 97%.
 - e. Pengadaan Sarana Penyimpanan Vaksin, dengan alokasi dana sebesar Rp.150.000.000,- dipergunakan untuk belanja pengadaan bahan pakai habis peralatan praktek kerja (termometer suhu digital), serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.149.198.000,- atau 99.47%. realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada selisih harga antara DPA dengan harga riil di e-katalog.
 - f. Pekan Imunisasi Nasional/Campak, dengan alokasi dana sebesar Rp.150.000.000,- dipergunakan untuk rapat

pertemuan, perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka bimbingan teknis di puskesmas, perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pengambilan vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi, belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.149.711.640,- atau 99.81%

- g. Penanggulangan Penderita AFP, Kasus Campak, KLB Flu Burung, dengan alokasi dana sebesar Rp.60.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan program AFP, KLB, Campak dan Flu Burung, belanja bahan pakai habis alkes, kedokteran dan laboratorium, perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelacakan kasus, pembinaan surveilans ke puskesmas, perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pengiriman sampel ke BBLK Surabaya dan konsultasi program surveilans ke Dinas Kesehatan Jawa Timur, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.54.000.000,- atau 90%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan penyerapan disesuaikan dengan kasus yang ada.
- h. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, dengan alokasi dana sebesar Rp.259.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis alat kesehatan, kedokteran dan laboratorium, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.250.426.208,- atau 96.69%. realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.
- i. Pengamatan dan Pencegahan Program Imunisasi dan Kasus Difteri, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan koordinasi pengelola puskesmas, perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelacakan kasus, pengiriman sampel ke BBLK, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.9.100.000,- atau 91%. Realisasi tidak terserap

100% dikarenakan penyerapan disesuaikan dengan kasus yang ada.

- j. Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara, dengan alokasi dana sebesar Rp.150.000.000,- dipergunakan untuk Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Publikasi Dokumentasi dan dekorasi, Belanja Jasa Narasumber/ tenaga ahli/ Instruktur, Belanja penggandaan, Belanja makan dan minuman rapat, Belanja Transport dan Akomodasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.146.539.823,- atau 97.69%.
- k. Peningkatan dan Pelatihan Petugas Keswa dan Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie, dengan alokasi dana sebesar Rp.219.000.000,- dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.202.525.000,- atau 92.48%. realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.
- l. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,- dipergunakan untuk sosialisasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.100.000.000,- atau 100%.
- m. Pelayanan Kesehatan Indera, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk sosialisasi pelayanan kesehatan indera, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.50.000.000,- atau 100%.
- n. Pembinaan Paguyuban Tuberkulosis Paru, dengan alokasi dana sebesar Rp.60.000.000,- dipergunakan untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan paguyuban TB, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan

- sebesar Rp.58.526.000,- atau 97.54%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada selisih harga antara riil dengan DPA.
- o. Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS, dengan alokasi dana sebesar Rp.82.500.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis alat kesehatan (rapid test), monev HIV/AIDS, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.76.713.800,- atau 92.99%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada selisih harga riil dengan DPA, dan untuk pengadaan reagen 2 tidak dilaksanakan dikarenakan ada alokasi reagen 2 dari Dinkes Provinsi Jawa Timur.
 - p. Pengadaan Sarpras Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan alokasi dana sebesar Rp.250.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis alat kesehatan, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.230.873.200,- atau 92.35%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada selisih harga DPA dan harga riil di e-katalog.
 - q. Pelayanan Kesehatan Haji, dengan alokasi dana sebesar Rp.175.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan pakai habis alat kesehatan kedokteran dan laboratorium, Narasumber pertemuan, belanja seminar kit serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.174.895.900,- atau 99.94%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada selisih harga DPA dan harga riil.
5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- a. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DBHCHT), dengan alokasi dana sebesar Rp.20.633.546.000,- dipergunakan untuk Rehabilitasi Puskesmas dengan volume kegiatan 6 Puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp.18.411.288.757,- atau 89.23%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.

- b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.627.200.000,- dipergunakan untuk pengadaan konstruksi sarana kesehatan dengan volume kegiatan 2 sarpras, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.624.825.405,- atau 99.62%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.
- c. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.499.999.000,- dipergunakan untuk Rehabilitasi Puskesmas dengan volume kegiatan 1 Puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.451.676.794,- atau 96.78%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini mengalami perubahan sesuai dengan penyempurnaan Matrik Renstra Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2019 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergiskan pembiayaan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber.

Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan bisa tercapai sesuai target yang ditentukan. Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2019 di Kabupaten Lamongan mengacu hasil Tahun 2018 yaitu 72.04, hal ini dikarenakan data Tahun 2019 belum keluar dari BPS. Berdasarkan acuan tersebut maka capaian 72.04 lebih dari target yang ditentukan 71.86, atau 100.25%. Angka Harapan Hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase puskesmas terakreditasi. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah 80.85, hasil ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 80.75, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100.12%

atau dapat dikatakan sangat berhasil karena melebihi batas rentang 90 – 100%.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mempunyai Rencana Strategi (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai tahun 2016 – 2021 dan penyempurnaan Indikator Kinerja Tahun 2019 yang harus dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan memiliki 1 (satu) visi dan 1 (satu) misi, 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran, 2 (dua) indikator kinerja, 9 (sembilan) program yang dilaksanakan melalui 131 (seratus tiga puluh satu) kegiatan.

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan, adanya kegiatan promosi dan sosialisasi pada program dan kegiatan di masing-masing bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) dapat memberikan motivasi terhadap kinerja organisasi yang lebih baik, sehingga tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan baik.

Untuk kegiatan dengan pencapaian kurang, maka akan lebih meningkatkan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, sehingga terbentuk satu kerja sama yang baik dengan harapan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan bisa mencapai target yang telah ditetapkan bersama serta diharapkan pula

agar pengalokasian anggaran dapat di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program maupun kegiatan di masing-masing bidang.

Untuk kegiatan program yang berhubungan dengan anggaran yang tidak seluruhnya terserap, maka diharapkan untuk lebih bisa melaksanakan program dengan perencanaan yang lebih baik guna terpenuhinya hasil yang maksimal seperti yang diharapkan dengan tidak mengabaikan faktor efisiensi dalam penggunaan anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN